

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumen, penelitian ini menyimpulkan bahwa Polresta Kupang Kota telah menerapkan strategi komunikasi krisis secara terencana dan terpadu dalam penanganan demonstrasi mahasiswa terkait kenaikan tunjangan DPRD pada 1 September 2025. Strategi tersebut dijalankan secara berkesinambungan pada seluruh tahapan krisis, mulai dari pra-krisis, saat krisis, hingga pasca-krisis, sehingga mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung.

Pada tahap pra-krisis, kesiapsiagaan Polresta Kupang Kota terlihat melalui berbagai langkah antisipatif, seperti deteksi dini oleh Sat Intelkam, pendekatan persuasif oleh Sat Binmas, perencanaan komunikasi publik oleh Humas, serta kesiapan teknis pengamanan oleh Satuan Dalmas. Di sisi lain, adanya komunikasi awal dari pihak mahasiswa melalui penyampaian surat pemberitahuan aksi menunjukkan bahwa sejak awal telah terbangun pola komunikasi yang cukup baik antara aparat kepolisian dan massa aksi. Kondisi ini berperan penting dalam menciptakan situasi yang kondusif serta meminimalkan potensi konflik sebelum aksi demonstrasi dilaksanakan.

Selanjutnya, pada tahap saat krisis, strategi komunikasi yang diterapkan oleh Polresta Kupang Kota bersifat responsif dan menyesuaikan dengan dinamika di

lapangan. Koordinasi yang solid antarunit kepolisian menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas situasi selama aksi berlangsung. Pendekatan komunikasi yang persuasif dan dialogis terbukti mampu meredam emosi massa, mencegah terjadinya tindakan anarkis, serta memastikan aspirasi mahasiswa dapat disampaikan secara tertib dan aman. Selain itu, pemanfaatan media sosial resmi sebagai sarana komunikasi publik turut membantu menjaga opini masyarakat dan mencegah berkembangnya informasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Pada tahap pasca-krisis, Polresta Kupang Kota melakukan evaluasi dan tindak lanjut komunikasi sebagai bentuk pembelajaran organisasi. Evaluasi yang melibatkan Sat Intelkam, Sat Binmas, Humas, dan Satuan Dalmas menunjukkan adanya upaya untuk mengidentifikasi kendala, memperbaiki pola koordinasi, serta meningkatkan kualitas pengamanan di masa mendatang. Komunikasi lanjutan yang bersifat humanis dan dialogis dengan mahasiswa juga berkontribusi dalam menjaga hubungan jangka panjang antara kepolisian dan mahasiswa. Meskipun demikian, mahasiswa masih berharap adanya penguatan peran dialog yang lebih substantif antara mahasiswa, kepolisian, dan pemerintah sebagai tindak lanjut dari aspirasi yang telah disampaikan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi krisis yang diterapkan oleh Polresta Kupang Kota memiliki kesesuaian dengan Teori Komunikasi Krisis Situasional (*Situational Crisis Communication Theory/SCCT*). Polresta Kupang Kota berada pada posisi sebagai institusi publik yang tidak menjadi penyebab langsung krisis (*victim cluster*), sehingga strategi komunikasi yang digunakan

lebih menekankan pada penyampaian informasi, imbauan persuasif, serta pendekatan humanis. Penerapan komunikasi yang bersifat preventif, responsif, dan evaluatif secara konsisten terbukti efektif dalam menjaga stabilitas keamanan, mempertahankan citra institusi kepolisian, serta memperkuat kepercayaan publik dalam menghadapi dinamika aksi demonstrasi mahasiswa.

6.2 Saran

1. Bagi Kepolisian (Polresta Kupang Kota)

Polresta Kupang Kota diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan strategi komunikasi krisis yang bersifat preventif, humanis, dan berbasis dialog dalam penanganan aksi demonstrasi mahasiswa. Penguatan koordinasi komunikasi antarunit, peningkatan kemampuan personel dalam komunikasi persuasif, serta pengelolaan emosi massa perlu terus dikembangkan. Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang transparan dan informatif diharapkan dapat lebih dioptimalkan.

2. Bagi Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan

Mahasiswa diharapkan dapat terus membangun komunikasi yang konstruktif dan kooperatif dengan aparat kepolisian dalam setiap pelaksanaan aksi demonstrasi. Kepatuhan terhadap prosedur hukum, keterbukaan dalam menyampaikan aspirasi, serta komitmen menjaga ketertiban umum menjadi faktor penting dalam menciptakan aksi demonstrasi yang damai dan bermartabat. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan momentum

pasca-aksi sebagai ruang dialog berkelanjutan dengan pemerintah dan pihak terkait untuk mendorong penyelesaian substansi tuntutan yang disampaikan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji komunikasi krisis dalam penanganan demonstrasi dengan menggunakan pendekatan atau teori lain, seperti teori manajemen konflik, komunikasi publik, atau tata kelola komunikasi.